

**MODEL KOMUNIKASI RESES ANGGOTA DPRD KOTA PEKANBARU
FRAKSI PDIP DAN FRAKSI GOLONGAN KARYA DALAM MENYERAP ASPIRASI
MASYARAKAT DI DAPIL II KECAMATAN RUMBAI DAN RUMBAI PESISIR**

**Oleh : Nadhila Qisthi Amalia
Pembimbing : Dr. Muhammad Firdaus, M.Si**

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya km 12,5 Simpang baru- Pekanbaru 28293
TELP. (0761) 63277/23430

Abstract

Communication is a basic human activity. Communication can occur in all directions, and in any form. One of the communication that happened to DPRD member and society like recess activity of DPRD member. Members of the DPRD Pekanbaru as a representative of the people have a responsibility to be able to fight for the interests of the people. This study aims to determine the model of communication conducted by Members of Parliament Pekanbaru PDIP Faction Fraction and Faction Golongan Karya in the recess in Dapil II District Rumbai and Rumbai Pesisir, what are the aspirations of the community who became the discussion at the time DPRD Member Pekanbaru PDIP Faction And Faction Golongan Karya The work of the Reses, and what are the obstacles and supporting factors when DPRD Member Pekanbaru PDI-P Faction and Faction Golongan Karya Faction conducted arecess. This research uses qualitative method.

The subjects of this study consisted of 7 people, 2 Staff Secretariat DPRD Pekanbaru City, 2 Members of DPRD Pekanbaru City and 3 People Society selected by using purposive techniques. This study uses observation data collection techniques, interviews, and research documentation. To achieve the validity of this research data, researchers use extension of participation and triangulation.

The results of this study show the first, Communication Model of Members of Parliament Reses Pekanbaru PDI-P Faction and Faction Golongan Karya In Absorb Aspirations Society with the constituent elements, media and also the response. Second Aspirations of the Community at the recess of Mr. Dapot Sinaga, SE is in the form of making Irrigation Water, Posyandu, and Field Football. While the aspirations of the community in the recess of Ibu Hj. Masny Ernawati is repairing Posyandu floor into ceramic, and Toa. Third, Factors inhibiting the recess of members of DPRD Pekanbaru City Mr. Dapot Sinaga, SE and Mrs. Hj. Masny Ernawati is when there is delay comes at the time of recess activity, and when the power goes out. While the supporting factor of recess activity is the member of DPRD Pekanbaru who carry out the recess has been directly involved in the election and already recognize the surrounding community. The second factor is already served as member of DPRD Pekanbaru City in the previous period.

Keywords: *Communication, Recess, DPRD Pekanbaru City*

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat atau di mana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Pentingnya komunikasi bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri begitu juga bagi suatu organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik suatu organisasi dapat berjalan lancar dan berhasil dan begitu pula sebaliknya, kurang atau tidak adanya komunikasi maka suatu organisasi dapat mengalami kesulitan.

Komunikasi bisa terjadi kesegala arah, dan dalam bentuk apapun. Salah satunya komunikasi yang terjadi pada Anggota DPRD dan masyarakat seperti kegiatan reses anggota DPRD. Kegiatan reses dilaksanakan oleh anggota DPRD sebagaimana diatur dalam pasal 65 Keputusan DPRD Kota Pekanbaru Nomor Kpts. DPRD/XI/2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini, dalam menjalankan peran DPRD sebagai posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat di era otonomi daerah ini, merupakan fenomena yang cukup menarik. Tanggapan-tanggapan pesimis yang sebelumnya mengarah kepada institusi lembaga perwakilan ini kini menjadi pembahasan yang cukup menarik. Pergeseran akan peran dan fungsi lembaga legislatif di era otonomi daerah ini di tandai dengan penegasan akan peran tugas dan wewenang DPRD, yakni selain menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi sebuah kebijakan pemerintah daerah juga melakukan fungsi pengawasan. Lebih tegas

lagi dinyatakan dalam penjelasan umum UU Nomor 32 Tahun 2004, bahwa DPRD harus menyatu dengan masyarakat daerah dan dipisahkan dari pemerintah daerah.

Hal-hal positif antara lain terbukanya aspirasi politik, terbukanya kemerdekaan pers, adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul yang bermuara pada peningkatan partisipasi rakyat secara signifikan. Sedangkan hal-hal negatif antara lain timbulnya euphoria politik pada diri masyarakat yang tidak diimbangi oleh pendidikan politik.

Keberadaan lembaga perwakilan rakyat mengandung maksud bahwa rakyat diharapkan ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui para wakilnya yang berada di DPRD, lebih lanjut Azam Awang mengemukakan sebagai berikut :

“Kedalam berperannya anggota DPRD untuk menyalurkan aspirasi masyarakat pada hakikat berkenan dengan masalah hubungan antara badan tersebut dengan anggota masyarakat yang diwakili mereka secara individu, berdasarkan kelompok maupun secara keseluruhan, sehingga secara principal setiap wakil wakil haruslah melihat dirinya sebagai mewakili warga negara yang berada di dalam batas ruang lingkup perwakilan secara keseluruhan”. (Azam Awang, 1991)

Dengan demikian kedudukan serta keberadaan lembaga perwakilan rakyat mengundang arti penting dalam memperhatikan kepentingan rakyat yang dirumuskan dalam suatu kebijakan pemerintah sehingga diharapkan timbulnya keterpaduan antara kebijakan yang dirumuskan dengan partisipasi masyarakat secara aktif, nyata dan bertanggung jawab . seperti yang dirumuskan dalam UU Nomor. 32 Tahun 2004, dengan kata lain bahwa DPRD merupakan lembaga yang berperan sekaligus berfungsi sebagai agen perubahan sosial.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru sebagai wakil rakyat mempunyai tanggungjawab untuk dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Untuk itu anggota dewan dengan cara menjaring aspirasi yang berkembang melalui beberapa cara, misalnya penyampaian aspirasi secara langsung hasil pengumpulan pendapat umum. Banyak kasus di beberapa daerah, konstituen mengeluh karena anggota DPRD yang mereka pilih sebagai wakil di parlemen, kurang akomodatif sehingga tidak pernah berkunjung dan berkomunikasi dengan konstituennya, sehingga konstituen partai politik tertentu kehilangan saluran komunikasi untuk menyalurkan aspirasi mereka, atau anggota DPRD pernah berkunjung dan menyerap aspirasi konstituen, tetapi aspirasi mereka tidak pernah terwujud dalam bentuk proyek pembangunan atau program di daerah mereka.

Respon masyarakat terhadap lembaga perwakilan tersebut seharusnya dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dan ini harus dibuktikan oleh setiap anggota legislatif dalam hubungannya dengan rakyat. Anggota legislatif mempunyai kewajiban untuk bertemu dengan konstituennya melakukan komunikasi. Dalam menjalankan tugasnya seorang wakil rakyat harus tahu dengan apa yang diinginkan oleh konstituen yang diwakilinya. Banyak cara yang harus dilakukan oleh wakil rakyat untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satunya dengan melakukan komunikasi dengan konstituennya, hal ini sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh wakil rakyat. Rakyat berhak menyampaikan apa yang diinginkannya kepada wakilnya untuk diperjuangkan dalam sebuah kebijakan.

Salah satu ekspektasi pemilih dalam menyalurkan aspirasi mereka melalui anggota legislatif yang mereka pilih yaitu dengan mekanisme penyaringan dan penyaluran aspirasi, hal ini dapat dilakukan

lewat mekanisme reses. Sebagai Lembaga Legislatif yang anggotanya dipilih secara langsung oleh Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengartikan bahwa kedudukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikarenakan suara rakyat yang memilihnya. Oleh sebab itu konsekuensinya bagi setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih harus memperhatikan para pemilihnya.

Kemampuan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pembangunannya sesuai aturan hukum dan koridor kebijakan yang telah disepakati bersama.

Untuk itulah pentingnya pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dan pemerintah daerah.

Dasar Pelaksanaan Reses antara lain adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU RI No 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU RI No 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah.

Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung. Masa reses mengikuti masa persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD. Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala yang merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.

Sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor: 08/ KPTS/ DPRD/ 2014 bahwa untuk melaksanakan kedaulatan yang didasarkan pada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, perlu diwujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mampu menyelenggarakan seluruh tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai mitra yang sejajar dengan Pemerintah Daerah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kegiatan reses Anggota DPRD Fraksi PDIP di Dapil II Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir yaitu Bapak Dapot Sinaga, SE sedangkan dari Fraksi Golongan Karya di Dapil II Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu Ibu Hj. Masny Ernawati. Kegiatan reses ini disambut dengan baik oleh masyarakat, dengan adanya kegiatan reses ini masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya mengenai daerah tempat kegiatan reses dilaksanakan.

Penelitian ini saya lakukan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir karena di Dapil II pada saat ini sedang mengalami pertumbuhan dalam bidang infrastruktur. Oleh karena itu pada masa reses tiba masyarakat mengikuti setiap alur pelaksanaan reses tersebut untuk menyampaikan aspirasinya. Seperti pembangunan posyandu, Alat Rebana,

pembuatan drainase serta pemasangan lampu jalan.

Kerangka Dasar Teori

Model Komunikasi

Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. (Arni, 1992:5). Model adalah kerangka kerja konseptual yang menggambarkan penerapan teori untuk kasus-kasus tertentu. Sebuah model membantu kita mengorganisasikan data-data sehingga dapat tersusun kerangka konseptual tentang apa yang akan diucapkan atau ditulis. Kerap kali konseptual tentang apa yang akan diucapkan atau ditulis, digunakan untuk mengekspresikan definisi komunikasi, bahwa komunikasi adalah proses transmisi dan resepsi informasi antara manusia melalui aktivitas encoder yang dilakukan pengirim dan decoder terhadap sinyal yang dilakukan oleh penerima.

David Crystal dalam bukunya *A Dictionary of Linguistics Phonetics* kerap memodelkan komunikasi melalui definisi, komunikasi terjadi ketika informasi yang sama maksudnya dipahami oleh pengirim dan penerima. Sedangkan Edmondson dan Burquest mengatakan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi berisi jenis-jenis kode yang dikomunikasikan melalui sebuah proses encoding suatu konsep yang akan disandi balik melalui proses decoding. (Liliweri, 2011:78)

Menurut Sereno dan Mortensen model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Model komunikasi mempresentasikan secara abstrak ciri-ciri penting dan menghilangkan rincian komunikasi yang tidak perlu dalam dunia nyata. Sedangkan B. Audrey Fisher mengatakan, model adalah analogi yang mengabstraksikan dan memilih bagian dari

keseluruhan unsur, sifat, atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model. Model adalah gambaran onformal untuk menjelaskan atau menerapkan teori, dengan kata lain, model adalah teori yang lebih disederhanakan.

Wener K. Severin dan W. Tankerd Jr mengatakan model membantu merumuskan teori dan menyarankan hubungan. Oleh karena hubungan antara model dengan teori begitu erat, model sering dicampurkan dengan teori. Oleh karena kita memilih unsur-unsur tertentu yang kita masukkan dalam model, suatu model mengimplikasikan penilaian atas relevansi, dan ini pada gilirannya mengimplikasikan teori mengenai fenomena yang diteorikan. Model dapat berfungsi sebagai basis teori yang lebih kompleks, alat untuk menjelaskan teori dan menyarankan cara-cara untuk memperbaiki konsep-konsep. (Mulyana,2008:131).

Interaksi Simbolik

Interaksi simbolik merupakan suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna (Mulyana, 2001:68). Teori interaksi simbolik berkembang pertama kali di Universitas Chicago. Teori ini kemudian dicetuskan oleh George Herbert Mead (1863-1931).

1. “Manusia, tidak seperti hewan lebih rendah, diberkahi dengan kemampuan berfikir.
2. Kemampuan berfikir itu dibentuk oleh interaksi sosial.
3. Dalam interaksi sosial orang belajar makna dan simbol yang memungkinkan mereka menerapkan kemampuan khas mereka sebagai manusia, yakni berfikir.
4. Makna dan simbol memungkinkan orang

melanjutkan tindakan dan interaksi yang khas manusia.

5. Orang mampu memodifikasi atau mengubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan interetasi mereka atas situasi.
6. Orang mampu melakukan modifikasi dan perubahan ini karena, antara lain, kemampuan mereka berinteraksi dengan diri sendiri, yang memungkinkan mereka memeriksa tahapan-tahapan tindakan, menilai keuntungan dan kerugian relative, dan kemudia memilih salah satunya.
7. Pola-pola tindakan dan interaksi yng jalin-menjalin ini membentuk kelompok dan masyarakat”. (Muyana, 2006:68).

Definisi interaksi simbolik adalah sebagai hal yang saling berhubungan dengan pembentukan makna dari suatu benda atau lambang atau simbol, baik benda mati maupun benda hidup, melalui proses komunikasi baik sebagai pesan verbal maupun perilaku nonverbal dan tujuan akhirnya adalah memaknai lambang atau simbol (objek) berdasarkan kesepakatan bersama yang berlaku di wilayah atau kelompok komunitas tertentu (Narwoko, 2004,23).

Menurut Blumer yang terjadi pada suatu interaksi dalam masyarakat adalah bahwa proses sosial dalam kehidupan kelompoklah yang menciptakan dan bahkan menghancurkan aturan-aturan dan bukan sebaliknya, bahwa aturan-aturanlah yang menciptakan dan menghancurkan kehidupan kelompok. Menurut teori interaksi simbolik, dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi adalah tindakan bersama. Masyarakat dianggap produk dari interaksi simbolik.

Menurut Mead (Narwuko, 2014:23) interaksi simbolik, menurut Herbert Blumer, merujuk pada” karakter interaksi khusus yang sedang berlangsung antara manusia.” Aktor tidak semata-mata bereaksi terhadap tindakan yang lain tetapi dia menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang lain. Respon aktor baik secara langsung maupun tidak langsung, selalu didasarkan atas makna penilaian tersebut. Oleh karenanya, interaksi manusia dijumpai oleh penggunaan simbol-simbol penafsiran atau dengan menemukan makna tindakan orang lain. Dalam konteks itu, menurut Blumer, aktor akan memilih, memeriksa, berfikir, mengelompokkan dan menstransformasikan makna dalam kaitannya dengan situasi dimana dan kearah mana tindakannya.

Interaksi simbolik adalah interaksi yang memunculkan makna khusus dan menimbulkan interpretasi atau penafsiran. Simbolik berasal dari kata “simbol” yakni tanda yang muncul dari hasil kesepakatan bersama. Bagaimana suatu hal menjadi perspektif bersama, bagaimana suatu tindakan memberi makna-makna khusus yang hanya dipahami oleh orang-orang yang melakukannya.

Konsep Reses

Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.

Dasar Pelaksanaan Reses antara lain adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU RI No 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan,

dan UU RI No 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah.

Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung. Masa reses mengikuti masa persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD.

Kegiatan reses sekurangnya meliputi 4 tahapan, yaitu: Rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses; Penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekretariat DPRD; Pelaksanaan Reses; dan Rapat Paripurna pelaporan hasil reses.

Tujuan reses yaitu untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggung jawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Konsep DPRD

Pengikutsertaan rakyat untuk turut bertanggung jawab di dalam pemerintahan diwujudkan dengan adanya lembaga DPRD yang melaksanakan fungsi legislatif dan tugas kontrol dan pengawasan atas pelaksanaan tugas kepala daerah (eksekutif) dalam melaksanakan tugasnya.

Penyertaan rakyat di dalam pemerintah daerah melalui wakil- wakilnya adalah sejalan dengan asas demokrasi yang dianut oleh negara Republik Indonesia. Pelaksanaan hak rakyat ini dilakukan lewat Pemilihan Umum yang diselenggarakan pemerintah setiap periode tertentu.

Sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor: 08/ KPTS/ DPRD/ 2014 bahwa untuk melaksanakan kedaulatan yang didasarkan pada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan, perlu diwujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mampu menyelenggarakan seluruh tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai mitra yang sejajar dengan Pemerintah Daerah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsep Masyarakat

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut "*society*", asal katanya *socius* yang berarti kawan. Adapun kata "masyarakat" berasal dari bahasa Arab, yaitu *syirk*, artinya bergaul. Adanya saling bergaul itu tentu karena ada bentuk-bentuk atuan hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan.

Para ahli seperti Maclver, J.L Gillin, dan J.P. Gillin sepakat, bahwa adanya saling bergaul dan interaksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2) Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009:115-118).

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian

Kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang lain dalam bahasa dan peristilahanya (Krik dan Miller, 2005 : 23).

Menurut Bogman dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Boglan dan Taylor (1995), pendekatan ini diarahkan dengan latar individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variable atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (dalam Moleong, 2005 : 4).

Penulis menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif yang dapat diartikan prosedur masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dilapangan sebagaimana adanya.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Mengadakan observasi dalam kenyataan melukiskan dengan kata-kata secara cermat dengan tepat apa yang telah diamati, mencatatnya dan kemudian mengolahnya dalam rangka masalah yang diteliti secara ilmiah (Nasution, 2008:106). Observasi adalah kegiatan yang paling utama dan teknik penelitian yang penting. Penulis menggunakan observasi tak berperan dimana peneliti hanya melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai fenomena-fenomena yang diteliti dengan tidak ikut dalam peristiwa suatu kegiatan yang diamati secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Banister (dalam Poerwandari, 2007) menyatakan wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud ingin memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang akan diteliti dan bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, suatu hal yang tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lain.

3. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono, (2009:240) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai kegiatan. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.

Hasil Penelitian

5.1.1 Model komunikasi yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Pekanbaru Fraksi PDIP Dan Fraksi Golongan Karya dalam kegiatan reses di Dapil II Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir

Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. (Arni, 1992:5). Model Komunikasi anggota DPRD Kota Pekanbaru Bapak Dapot Sinaga, SE dan Ibu Hj. Masny Ernawati dalam kegiatan reses yaitu terjun langsung menjumpai Pemuka masyarakat, Ketua Pemuda dan Majelis Taqlim. Anggota Dewan melakukan musyawarah untuk menentukan kapan reses akan dilaksanakan menyesuaikan jadwal kegiatan reses dengan waktu yang tepat bagi masyarakat tempat reses akan dilaksanakan.

Model komunikasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru yaitu kunjungan konstituen reses, media yang digunakan pada saat reses, dan respon kegiatan reses. Hubungan hasil penelitian ini dengan teori yang digunakan yaitu teori interaksi simbolik yaitu pemahaman manusia terhadap symbol-symbol yang terdapat dalam proses komunikasi yang terjadi. Dalam hal ini, masyarakat memahami symbol-symbol yang di paparkan oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru yang melaksanakan kegiatan reses tentang segala hal mengenai dirinya, fungsi dia terhadap masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat kepada masyarakat di daerah pemilihan anggota DPRD kota Pekanbaru tersebut.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru yaitu Bapak Dapot Sinaga, SE dan Ibu Hj. Masny Ernawati pada kegiatan reses melakukan interaksi dengan cara melakukan komunikasi secara langsung kepada masyarakat yang datang pada kegiatan reses yang dilaksanakan masing-masing anggota DPRD Kota Pekanbaru ditempat yang berbeda. Kedua anggota DPRD Kota Pekanbaru tersebut mengenalkan dirinya terlebih dahulu kepada masyarakat, lalu kemudian menyampaikan beberapa hal mengenai jabatannya sebagai wakil rakyat. Setelah membuka kegiatan reses dengan memaparkan beberapa hal mengenai dirinya, anggota DPRD ini memberikan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka mengenai daerah sekitar.

Anggota DPRD menanggapi semua aspirasi masyarakat yang disampaikan pada kegiatan reses berlangsung. Anggota DPRD Kota Pekanbaru berusaha untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut pada Sidang Paripurna Istimewa yang akan dilaksanakan pada saat seluruh kegiatan dan laporan akhir reses selesai. Dari sekian banyak aspirasi masyarakat yang

terkumpul, akan ada beberapa aspirasi yang terpilih pada saat Sidang Paripurna berlangsung pada setiap Daerah Pemilihan. Setelah hasil Sidang paripurna selesai, anggota DPRD Kota Pekanbaru akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa mana saja aspirasi yang di terima dan akan direalisasikan.

Dari pemaparan diatas maka dapat terlihat bahwa interaksi simbolik yang dilakukan kedua anggota DPRD Kota Pekanbaru Daerah Pemilihan II Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir ini berjalan dengan baik antara Anggota dewan dengan masyarakat.

5.2.2 Aspirasi masyarakat yang menjadi pembahasan pada saat Anggota DPRD Kota Pekanbaru Fraksi PDIP Dan Fraksi Golongan Karya melakukan Reses

Penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD secara langsung dengan dialog tatap muka, kegiatan saat kunjungan kerja baik masa sidang atau memasuki masa Reses. Bertujuan untuk menyerap, menghimpun, dan menampung aspirasi masyarakat. Secara tidak langsung berupa konsultasi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menampung aspirasi yang disalurkan dari Pemerintah Daerah.

Aspirasi masyarakat atau hasil reses DPRD Kota Pekanbaru adalah hasil kunjungan Anggota DPRD Kota Pekanbaru ke konstituen pada masing-masing daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat berupa program dan kegiatan yang nantinya diusulkan oleh DPRD dalam APBD. Mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD dalam proses ppenyusunan APBD dengan peninjauan lapangan dan pertemuan warga menurut Dwiyanto dkk (2003), kegiatan tersebut lebih dominan daripada mekanisme atau sarana konvensional seperti musrenbang, seminar dan lain-lain.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan aspirasi masyarakat pada kegiatan reses Ketua Fraksi PDIP Bapak Dapot Sinaga, SE yaitu berupa aspirasi pembuatan Lapangan Sepak Bola, pembuatan Irigasi air, Posyandu, Aliran listrik, Pengaspalan Jalan, serta Pembuatan Posyandu. Seluruh aspirasi masyarakat ini akan di catat dalam laporan kegiatan reses anggota dewan yang akan di sampaikan dan diperjuangkan pada Rapat Sidang Paripurna yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kota Pekanbaru beserta SKPD (Satuan Kerja Pejabat Daerah) Kota Pekanbaru.

Aspirasi masyarakat pada kegiatan reses Ketua Fraksi Golkar Ibu Hj. Masny Ernawati yaitu Pemasangan keramik pada Posyandu, Perbaikan Drainase yang tersumbat, alat Rebana serta Pembelian Toa atau penguat suara. Aspirasi masyarakat pada kegiatan reses Ibu Hj. Masny Ernawati juga akan dimasukkan dalam laporan kegiatan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru yang akan di catat oleh Staff Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru yang mendampingi anggota dewan dalam kegiatan reses.

5.2.3 Faktor penghambat dan pendukung pada saat Anggota DPRD Kota Pekanbaru Fraksi PDIP Dan Fraksi Golongan Karya melakukan Reses

Didalam berkomunikasi menggunakan interaksi simbolik tidak terlepas dari adanya hambatan-hambatan yang dapat menghalangi proses komunikasi. Hambatan-hambatan berkomunikasi menggunakan interaksi simbolik adalah penghalang atau hal-hal yang dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan interaksi simbolik dengan titik berat pada faktor komunikasi yang direncanakannya atau segi-segi komunikasi yang menghambat kegiatan atau bahkan proses interaksi simbolik. Hambatan-hambatan tersebut bisa datang dari berbagai pihak, antara lain pihak anggota DPRD Kota Pekanbaru apabila terlambat

datang dan masyarakat yang kurang memahami tiap alur kegiatan reses.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada kegiatan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru di Dapil II Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir terdapat beberapa faktor penghambat yaitu Hambatan Yang Berasal Dari Masyarakat, Hambatan Yang Berasal Dari Anggota DPRD Kota Pekanbaru, dan Hambatan Yang Berasal Dari Saluran.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa hambatan keterlambatan anggota DPRD Kota Pekanbaru datang terlambat pada kegiatan reses juga mempengaruhi keberlangsungan reses karena masyarakat sudah menunggu, lalu hambatan selanjutnya yaitu apabila listrik padam maka pelaksanaan reses yang dilakukan di ruang terbuka akan sangat sulit dilakukan karena apa yang disampaikan akan kurang jelas.

Adapun faktor pendukung pada saat kegiatan reses ini yaitu Sudah Pernah Bersosialisasi Pada Saat Pilkada dan Mengenali Masyarakat dan Sudah Menjabat Anggota DPRD Periode Sebelumnya. Seperti Ibu Hj. Masny Ernawati beliau sudah menjabat Anggota DPRD Kota Pekanbaru 3 (tiga) periode, hal ini tentu membuat beliau lebih mudah dalam melakukan sosialisasi kegiatan reses karena sudah dikenal oleh masyarakat.

Kesimpulan

1. Model Komunikasi Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru Fraksi PDIP dan Golongan Karya Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Dapil II Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir yang di ukur melalui beberapa indikator proses Komunikasi yang melibatkan unsur konstituen, media dan juga respon. Dalam model komunikasi reses anggota DPRD Kota Pekanbaru Fraksi PDIP dan Golongan Karya Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Dapil II

Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir dilihat melalui model komunikasi yang dilakukan pada saat akan melaksanakan reses.

2. Aspirasi Masyarakat pada kegiatan reses Fraksi PDIP Dapil II Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Bapak Dapot Sinaga, SE yaitu berupa pembuatan Irigasi Air, Posyandu, Lapangan Sepak Bola, Pengaspalan Jalan, Listrik, serta pembuatan Posyandu. Sedangkan Aspirasi Masyarakat pada kegiatan reses Fraksi Golkar Dapil II Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Ibu Hj. Masny Ernawati yaitu perbaikan lantai Posyandu menjadi keramik, Toa, Drainase yang tersumbat, serta Alat Rebana untuk ibu-ibu Majelis Taqlim. Seluruh Aspirasi Masyarakat ini akan dibahas pada Sidang Paripurna Anggota DPRD Kota Pekanbaru beserta SKPD (Satuan Kerja Pejabat Daerah) Kota Pekanbaru yang terkait.
3. Faktor Penghambat pada kegiatan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru Ketua Fraksi PDIP Bapak Dapot Sinaga, SE dan Ketua Fraksi Golkar Ibu Hj. Masny Ernawati yaitu apabila mengalami keterlambatan datang pada saat kegiatan reses, serta apabila listrik padam. Sedangkan Faktor pendukung kegiatan reses yaitu anggota DPRD Kota Pekanbaru yang melaksanakan reses sudah pernah terjun langsung pada saat Pemilu dan sudah mengenali masyarakat sekitar. Faktor kedua yaitu sudah pernah menjabat anggota DPRD Kota Pekanbaru pada periode sebelumnya.

Daftar Pustaka

Sumber Referensi Buku:

Bungin, Burhan. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Cangara, Hafied. 2010. *Pengantar Ilmu Komunikasi: Edisi Revisi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Friske, John. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Liliweri, Alo/ 2011. *Komunikasi Serba ada Serba Makna*. Jakarta : Penada Media Group.
- Muhammad, Arni. 2014. *Komunikasi Organisasi*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Mulyana, Deddy dan Solatun. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif : Contoh-contoh Metode Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2008. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Dsdakarya
- Nurhadi, zikri. 2015. *Teori-Teori Komunikasi: Teori Komunikasi Dalam Perspektif Penelitian Kualitatif*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Pawit M, Yusup. (2010). *Komunikasi Intruksional (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Poloma, Margaret, M. 1996. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rachmad, Jalaludin, 1998. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Riyadi, Soepapto. 2001. *Interaksi Simbolik Perspektif Sosiologi Modern*. Jakarta : Averroes Press dan Pustaka Pelajar.
- Sugiono . 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sugiono. 2012. *Memulai Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Soelaeman, Moenandar. 2011. *Ilmu Sosial Dasar – Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Vardiansyah, Dani. 2004 . *Pengantar Ilmu Komunikasi; Pendekatan Taksonomi Konseptual*. Depok : Ghalia Indonesia.
- Wardani, Diah. 2008. *Media Relations :Sarana membangun Reputasi Organisasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Widjaja. 2010. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Yasir. 2009. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Pekanbaru : Pusat Pengembangan Pendidikan.

Sumber Referensi Skripsi:

Dina Rindi Anggarina, “*Model Komunikasi Dalam Proses Negosiasi (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Model Komunikasi Dalam Proses Negosiasi Antara BPLS Dengan Masyarakat Terdampak Dalam Menyelesaikan Ganti Rugi Lapindo)*”, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Eko Priyo Utomo, “*Pola Komunikasi Masyarakat Adat Tujuh Suku dalam Menyampaikan Aspirasi Melalui Peran Legislatif di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat*”, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Muhammadiyah Jayapura

Sumber Referensi Internet:

Web(<http://www.metro7.co.id/2012/06/mengenal-resees.html> di akses 20 April 2017 Pukul 14.05 WIB)

Web(<http://www.riabook.com/berita/14246/ini-susunan-pengurus-partai-golkar-riau-dipimpin-arsyadjulian-rachman.html> diakses 4 juli 2017 Pukul 09.00 WIB)

Sumber Referensi Lainnya:

Buku Peraturan DPRD Kota Pekanbaru
Nomor: 08/ KPTS/ DPRD/ 2014